



KPK DAMPINGI PEGAWAI PEMKOT Sektor Pendidikan dan Kesehatan Rawan Korupsi

YOGYA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan pendampingan bagi pegawai di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Kali ini menyasar pegawai di sektor pendidikan dan kesehatan karena dinilai rawan terjadi tindakan korupsi.

Menurut Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi salah satu *national interest* yang dilirik KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Sektor lain ialah sumber daya alam, ketahanan pangan, infrastruktur dan penerimaan. "Kami ingin membangun garda moral anti korupsi bagi pegawai pemerintahan. Yogyakarta harus bisa

menjadi percontohan," ungkapnya usai membuka Focus Group Discussion (FGD) bagi pegawai Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan di Balaikota, Selasa (7/4).

Berdasarkan hasil kajian KPK di tahun 2013 dan 2014, terdapat beberapa modus korupsi yang dilakukan di sektor pendidikan dan kesehatan. Sektor pendidikan antara lain kerap

terjadi saat pencairan tunjangan profesi guru, penyaluran bantuan operasional pendidikan hingga manipulasi data pokok pendidikan (dapodik).

Sedangkan sektor kesehatan banyak terjadi pada pembelian alat kesehatan serta penetapan harga obat yang harus ditebus oleh konsumen. Pemberlakuan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan juga memiliki peluang tindakan korupsi oleh tenaga medis. "Makanya fokus kami sekarang lebih ke aspek pencegahan. Terutama penguatan kapasitas pegawai serta pemahaman mereka terkait gratifikasi," imbuhnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta Dra RR Titik Sulastri mengakui sektor pendidikan dan kesehatan rentan terhadap praktik korupsi. Menurutnya, tindakan korupsi seringkali berasal dari kebiasaan masyarakat seperti pemberian hadiah atas prestasi atau jasa pelayanan. Hal itu kerap dinilai sebagai sesuatu yang lumrah oleh masyarakat sebagai adat ketimuran atau wujud ungkapan terima kasih. "Yang seperti ini tentu perlu dibatasi serta harus ada penanaman nilai. Tidak hanya bagi aparat pemerintah saja, tapi juga bagi semua kalangan masyarakat," paparnya. (Dhi) - s

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 16 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005